



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 25 Januari 2021
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan tentang Pemekaran
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Tim Pemekaran Papua (Se-Tanah Tabi & Saireri) C. Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Pemekaran Papua (Se-Tanah Tabi & Saireri) dan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, dengan agenda mendapatkan masukan tentang pemekaran, hari Senin, 25 Januari 2021, dibuka pukul 13.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Pemekaran Papua (Se-Tanah Tabi & Saireri) dan

Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, dengan agenda mendapatkan masukan tentang pemekaran, yaitu:

Tim Pemekaran Papua (Se-Tanah Tabi & Saireri) menyampaikan: sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk mengkaji kemungkinan dimekarkannya Provinsi Papua menjadi 2 provinsi baru maka calon Daerah Otonom Baru Provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, Yaitu Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah.

1. Wilayah yang masuk dalam DOB Provinsi Papua Tengah meliputi 16 kabupaten yang berada di Wilayah Adat Lapago dan Meepago.
2. Wilayah yang masuk dalam DOB Provinsi Papua Selatan meliputi 4 kabupaten yang berada di wilayah adat Ha-Anim.
3. Wilayah yang masuk dalam Provinsi Induk Papua meliputi 8 kabupaten dan 1 Kota yang berada di wilayah adat Mamta (Tabi) dan Saireri.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Pemekaran Papua (Se-Tanah Tabi & Saireri) dan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, dengan agenda mendapatkan masukan tentang pemekaran, sebagai berikut:

1. Terdapat 9 daerah di Wilayah Tabi dan Saireri, yaitu:
 - Kota Jayapura
 - Kab. Jayapura
 - Kab. Keerom
 - Kab. Mamberamo Raya
 - Kab. Sarmi
 - Kab. Biak Numfor
 - Kab. Supiori
 - Kab. Yapen
 - Kab. Waropen
2. Wilayah Tabi dan Saireri meminta untuk tetap dalam Provinsi Papua Induk.
3. Terkait penggunaan dana otsus, secara regulasi 80% untuk Kabupaten/Kota dan 20% untuk Provinsi.
4. Tetapi terjadi ketidakadilan karena dalam pelaksanaan Kabupaten Kota lebih kecil, seperti Kota Jayapura hanya 46 M dan Kabupaten Yapen hanya 35 M dari dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua sebesar 5.8 T. Dan mengharapkan Komisi II DPR RI dan aparat penegak hukum meneleluri hal tersebut.

5. Kepulauan Nias meminta untuk pemekaran otonomi asimetris karena berada di perbatasan negara dan pertimbangan kepentingan strategis nasional (*top down*). Kepulauan Nias hampir jadi Provinsi pada tahun 2014, tapi gagal. Untuk itu jangan dilihat hanya sekarang tapi dulu sudah memenuhi syarat sebagai Provinsi. Kepulauan Nias harus dilihat sebagai mana pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.03 WIB.

Jakarta, 25 Januari 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270